

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume 1*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
2. Achmad Sodiki . 1994. "Penataan pemilikan hak Atas tanah di daerah perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum)". *Disertasi*, Universitas Airlangga. Surabaya.
- 3) Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 4) Adamson Hoebel. E. 1954. *The Law of Premitive Man, A Study in Comparartive Legal Dynamics*. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press
- 5) Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- 6) Aminuddin Salle, dkk, 2010, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, AS Publishing Makasar.
- 7) Barda Nawawi Arief. 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 8) Boedi Harsono. 2003.*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Cetakan Kesembilan. Djambatan. Jakarta.
- 9) _____, 2004. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Edisi I. Cetakan Ke enembelas, Djambatan. Jakarta.
- 10) _____, 2000, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Bandung.
- 11) _____, 2007, "PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya", *Majalah Renvoi*, No. 8.44. IV.
- 12) Budiono Kusumohamidjojo. 2000. *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia, Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, PT. Grasindo. Jakarta.

- 13) Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- 14) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Edisi Ke dua. Balai Pustaka. Jakarta.
- 15) Eddy Ruchiyat, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, CV. Armico, Bandung, 1984.
- 16) Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation. New York.
- 17) Gunardi, dkk, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 18) Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- 19) Herman Soesang Obeng, 1975, "Pertumbuhan hak milik individual menurut hukum adat dan menurut UUPA di Jawa Timur", *Majalah Hukum*, No. 3 Tahun ke dua, Yayasan Penerbitan dan Pengembangan Hukum (Law Centre), hal. 49-76.
- 20) Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur.
- 21) Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat sketsa Asas*, Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta.
- 22) Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- 23) Korn, VE. 1972, *Het Adatrecht Van Bali*, Terjem. I Gde Wayan Pangkat, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- 24) Leopold Pospisil. 1971. *Anthropology of Law a Comparative Theory*. Harper & Raw Publishers. New York, Evanston, San Francisco, London.
- 25) Lawrence M. Friedman. "Legal Culture and Social Development". *Law and the Behavioral Sciences*. Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay. (Eds). The Bobbs-Merrill Company, INC. A Subsidiary of Howard W. SAM & CO., INC. Indianapolis-Kansas City. New York.

- 26) Manullang, E. Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum kodrat dan Antinomi Nilai*. Cetakan 1. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- 27) Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Cetakan I. Fajar Interpratama, Surabaya.
- 28) Munir Faudy, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 29) Nurjaya, I Nyoman. 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Cetakan I. Kerjasama Progran Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unibraw, ARENA HUKUM Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS. Malang).
- 30) Parlindungan, 1998, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabatan Pembuatan Akta Tanah*, Alumni, Bandung.
- 31) Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan Pertama. PT. Bina Ilmu,. Surabaya.
- 32) Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 9 menyebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal.
- 33) Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung.
- 34) Sihombing Purwoatmodjo, J.D. 1970, *Hukum Agraria I*, Buku Pengantar Kuliah Fak. Hukum Universitas Sebelas Maret, Surabaya.
- 35) Soetomo, 1991, *Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Djambatan, Bandung.
- 36) Soekanto. 1973. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bhratara. Jakarta.
- 37) Soeripto, KRHM. 1979, *Hukum Adat Waris Bali*, Penerbitan ke II, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (UNEJ).
- 38) Surojo Wignjodipuro, 1978, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta.

- 39) Surya Prakash Sinha. 1993. *Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*, ST. Paul, Minn, West Publising CO.
- 40) Suwitra, I Made. 2009, "Eksistensi hak Penguasaan dan Pemilikan Ats Tanah Adat di Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasiona", *Disertasi*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- 41) Ter Haar. 1974. *Beginzellen En Sttsel Van Het Adatrecht*. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Terjem. K.ng. Soebakti Poesponoto. Cetakan ke-2. Pradnya paramita. Jakarta.
- 42) Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- 43) Utrecht, E. 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke Enam, P.T. Penerbitan dan Balai Buku Ichtia, Jakarta.
- 44) Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Tanah Indonesia*, Jilid 1, Pradnya Paramita, Jakarta.
- 45) Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Perundang-undangan

- 46) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.
- 47) Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
- 48) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.